

**ACCOUNTABILITY OF RIAU PROVINCE GOVERNMENT IN HANDLING  
VIOLENCE FOR WOMEN AND CHILDREN**

Oleh :

**M. TARIQ KAMAL  
NPM : 207321023**

**JURNAL INTERNASIONAL**

**Untuk Memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu  
Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU**

**LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ACCOUNTABILITY OF RIAU PROVINCE GOVERNMENT IN HANDLING  
VIOLENCE FOR WOMEN AND CHILDREN**

**JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI**

**Oleh**

**Nama : M. TARIQ KAMAL, SE**  
**NPM : 207321023**  
**Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan**

**TIM PENGUJI**

Ketua



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum**

Sekretaris



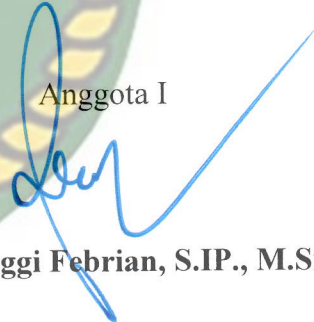
**Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A**

Anggota I



**Dr. Rendi Prayuda, S.IP., M.Si**

Anggota I



**Dr. Ranggi Febrian, S.IP., M.Si**

**Mengetahui**  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
**Universitas Islam Riau**



**Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum**

## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Dengan ini menyatakan bahwa Jurnal yang berjudul :

ACCOUNTABILITY OF RIAU PROVINCE GOVERNMENT IN HANDLING  
VIOLENCE FOR WOMEN AND CHILDREN

Oleh :

Nama : M. TARIQ KAMAL  
NPM : 207321023  
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diseminarkan

Pembimbing I

Tanggal... 4.9.22

  
Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

Tanggal... 3-9-22

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Riau

  
Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR :663/KPTS/PPs-UIR/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.	Guru Besar	Pembimbing I
2	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : M. TARIQ KAMAL

N P M : 207321023

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Judul Tesis : "PENERAPAN SISTEM PELAPORAN TINDAK KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK PADA UPT PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS ANDROID"

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 13 AGUSTUS 2021  
Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.  
NIP. 195408081987011002

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Tariq Kamal  
NPM : 207321023  
Program studi : Ilmu Pemerintahan  
Judul tesis : AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU DALAM PENANGANAN LAPORAN TINDAK KEKERASAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK BERBASIS ANDROID DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. \_\_\_\_\_ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. \_\_\_\_\_ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. \_\_\_\_\_ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. \_\_\_\_\_ Pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 12 November 2021

Yang menyatakan,



M. Tariq Kamal



TURNITIN\_TORIQ.docx

by T M



---

**Submission date:** 07-Apr-2022 11:40AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1804029463

**File name:** TURNITIN\_TORIQ.docx (26.66K)

**Word count:** 2922

**Character count:** 15767

ORIGINALITY REPORT

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**22%**  
INTERNET SOURCES

**16%**  
PUBLICATIONS

**9%**  
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://sustainabledevelopment.un.org">sustainabledevelopment.un.org</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.iosrjournals.org">www.iosrjournals.org</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://voi.id">voi.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://eudl.eu">eudl.eu</a> Internet Source	1%
5	Y Meo, I W Tyas. "Provision of community based clean water in Tonggo village, Nangaroro District, Nagekeo Regency", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020 Publication	1%
6	<a href="http://ojs.stiami.ac.id">ojs.stiami.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://journal.unimma.ac.id">journal.unimma.ac.id</a> Internet Source	



		1 %
9	<a href="http://kemenpppa.go.id">kemenpppa.go.id</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://westpapuanow.com">westpapuanow.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://careersdocbox.com">careersdocbox.com</a> Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	1 %
13	<a href="http://rjoas.com">rjoas.com</a> Internet Source	1 %
14	Ahmad Musthafa Azhom. "Realizing a Child Friendly City as Protection towards Children in Indonesia", Constitutionale, 2021 Publication	1 %
15	<a href="http://e-journal.unipma.ac.id">e-journal.unipma.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://ijariie.com">ijariie.com</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	Davinsi Josie Sidabutar, Lidia Br Karo, Herlambang Herlambang. "THE INHIBITING FACTORS IN THE IMPLEMENTATION OF	<1 %



WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT'S  
ROLES IN LAW ENFORCEMENT OF IMMORAL  
CRIMINAL ACT COMMITTED BY THE CLOSEST  
ADULTS TO MINORS IN THE JURISDICTION OF  
KEPAHIANG POLICE RESORT", Bengkoelen  
Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

19

[ejournal.upi.edu](http://ejournal.upi.edu)

Internet Source

<1 %

20

[jcreview.com](http://jcreview.com)

Internet Source

<1 %

21

"The International Conference on ASEAN  
2019", Walter de Gruyter GmbH, 2019

Publication

<1 %

22

Submitted to University of South Australia

Student Paper

<1 %

23

[download.atlantis-press.com](http://download.atlantis-press.com)

Internet Source

<1 %

24

Submitted to Universitas Borneo Tarakan

Student Paper

<1 %

25

[journal.walisongo.ac.id](http://journal.walisongo.ac.id)

Internet Source

<1 %

26

[www.dimas.web.id](http://www.dimas.web.id)

Internet Source

<1 %

27

[doaj.org](http://doaj.org)

Internet Source

<1 %



28

[garuda.kemdikbud.go.id](http://garuda.kemdikbud.go.id)

Internet Source

<1 %

29

[www.growingscholar.org](http://www.growingscholar.org)

Internet Source

<1 %

30

[dinastipub.org](http://dinastipub.org)

Internet Source

<1 %

31

[etd.unsyiah.ac.id](http://etd.unsyiah.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[iiste.org](http://iiste.org)

Internet Source

<1 %

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil' alamin...*

*Puji syukur yang tak terhingga dipanjatkan kepada ALLAH, Subhanahuwata'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan studi magisternya.*

*Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua papa dan mama yang selalu mendukung dan memotivasi, semoga Allah membalas semua kebaikan mama dan papa. Terkhusus untuk istri dan anak anak yang selalu setia mendampingi dan membantu dalam proses belajar semoga ini memotivasi kalian nak untuk ikhtiar belajar lebih giat mencapai cita-cita.*

*Dengan harapan karya tulisku ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi kebanggaan bagi keluargaku tercinta...*

*Akhir kata, semoga jurnal ini memberi kebermanfaatan bagi dunia pendidikan.*

*Dari bangkinang ke pekanbaru  
Membawa ooleh-oleh untuk minantu  
sekian lama aku menuntut ilmu  
Hari ini menjadi akhir penantianku*

*"Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauhi darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya."*

*... Umar bin Khattab...*

*M. TARIQ KAMAL*



## LEMBAR TUNJUK AJAR

*ALLAH SWT Berfirman,*

ذَكَرُ إِلَّا يَأْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا  
أُولُوا الْأَلْبَابِ

*"Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Barang siapa yang mendapat hikmah itu Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak. Dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal".  
(Q.S. Al-Baqarah: 269)*



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : M. Tariq Kamal  
Tempat/Tanggal lahir : Pekanbaru / 13 Juni 1986  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Alamat : Jl. Jalan Srikandi Perum Griya Idaman Srikandi Blok F4  
Nama Orangtua : Yusri Munaf (ayah)  
Feliatri (ibu)  
Riwayat Pendidikan : 1993 SD Islam As-shofa Pekanbaru  
1999 MTsN Pekanbaru  
2001 MAN 1 Pekanbaru  
2004 Universitas Islam Riau Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen  
Status Perkawinan : Kawin  
Suami : Poppy Sandri Devara, SE  
Anak 1 : Sarah  
Anak 2 : Dawud  
Anak 3 : Salma  
Pekerjaan : ASN Pemprov Riau  
Pangkat/Golongan : Penata / III.c  
Jabatan : Kasubbag Kepegawaian dan Umum Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Saat ini penulis tercatat sebagai Mahasiswa Pasca Sarjana di Universitas Islam Riau Pekanbaru dimana menyelesaikan studi dalam bentuk penulisan jurnal dengan judul “**Accountability Of Riau Province Government In Handling Violence For Women And Children**”.

# **Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Riau Dalam Menangani Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak**

M. Tariq Kamal

## **Abstrak**

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah menjadi permasalahan global di tingkat nasional maupun internasional. Karena semakin tingginya Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini pemerintah dituntut untuk meningkatkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Untuk meningkatkan pelayanan tersebut pemerintah pusat melalui kementerian perlindungan perempuan dan Anak mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 tahun 2018 tentang pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di daerah. Namun implementasi dari pelayanan tersebut yang nampak dalam kinerja UPT PPA belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: kekurangan anggaran, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga masih memerlukan peningkatan kinerja dalam menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggambarkan Akuntabilitas dalam penanganan korban kekerasan bagi perempuan dan anak. Selain itu, dideskripsikan pula beberapa kendala utama yang dihadapi oleh lembaga ini, diantaranya permasalahan anggaran, fasilitas, personil, keterbukaan korban, dan dukungan masyarakat.

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Tindak Kekerasan**



# Accountability of Riau province government in handling violence for women and children

## Abstract

The problem of violence against women and children has become a global problem at the national and international levels. Due to the increasing number of cases of violence against women and children, the government is required to improve services for victims of violence against women and children. To improve these services, the central government through the ministry of women's and children's protection issued the Minister of Women's and Children's Empowerment Regulation Number 4 of 2018 concerning the establishment of UPTD for the Protection of Women and Children in the regions. Gaps, including: lack of budget, coordination between stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so that performance still requires improvement in facing challenges for future improvements. By using descriptive qualitative research, the researcher describes Accountability in handling victims of violence for women and children. In addition, it also describes some of the main obstacles faced by this institution, including budget problems, facilities, personnel, victim disclosure, and community support.

**Keywords: Accountability, Violence**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahuwata'la yang telah memberikan nikmat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan jurnal ini dengan judul “**Accountability Of Riau Province Government In Handling Violence For Women And Children**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan.

Shalawat beriringkan salam tidak lupa pula buat junjungan alam yakni Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam dengan melafaskan “Allahumma sholli'ala Muhammad wa'ala alihi Muhammad”. Semoga jurnal ini bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau .
2. Direktur Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH, M.Hum juga sebagai pembimbing I kami yang telah memfasilitasi dan memberikan sumbangsiah pemikiran serta ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan penulis.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, M.A, juga sebagai pembimbing II yang telah memberikan sumbangsiah ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani studi dan pengarahan dalam penyusunan jurnal ini.
4. Ketua Unit Pengelola Jurnal dan Publikasi Ilmiah Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bapak Dr. Rendi Prayuda, S.IP, M.Si yang telah banyak membantu penulis dalam Publikasi Jurnal Internasional Bereputasi Terindeks Corpus Q3.
5. Segenap Staf Pengajar, Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga dan tak ternilai untuk bekal penulis di masa yang akan datang.
6. Seluruh Staf Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Tata Usaha serta Karyawan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi selama proses pembelajaran dan keperluan penulis yang berhubungan dengan jurnal ini.

7. Keluarga tercinta atas doa dan limpahan kasih sayang yang tidak ternilai untuk memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan jurnal ini.
8. Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Riau, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dan staf yang telah membantu penulis memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.
9. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan dan teman-teman sejawat yang tak bisa penulis sebutkan nama satu persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan jurnal ini.

Tak dapat penulis ungkapkan beribu terima kasih. Semoga Allah Subhanahuwata'ala melimpahkan Rahmat dan karunia serta keberkahan yang tak terhingga kepada kita semua. Aamiin ya rabbal'alamin.

Pekanbaru, April 2022

Penulis

M. Tariq Kamal





**How to Cite:**

Tariq Kamal, M., Munaf, Y., Yuza, A. F., Febrian, R. A., & Prayuda, R. (2022). Accountability of Riau province government in handling violence for women and children. *International Journal of Health Sciences*, 6(S4), 599–607. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS4.5584>

## Accountability of Riau province government in handling violence for women and children

**M. Tariq Kamal**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [m\\_tariq@student.uir.ac.id](mailto:m_tariq@student.uir.ac.id)

**Yusri Munaf**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [yusri.ip@soc.uir.ac.id](mailto:yusri.ip@soc.uir.ac.id)

**Ahmad Fitra Yuza**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [Fitra.ip@soc.uir.ac.id](mailto:Fitra.ip@soc.uir.ac.id)

**Ranggi Ade Febrian**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [ranggi.ip@soc.uir.ac.id](mailto:ranggi.ip@soc.uir.ac.id)

**Rendi Prayuda**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [rendiprayuda@soc.uir.ac.id](mailto:rendiprayuda@soc.uir.ac.id)

**Abstract**---The problem of violence against women and children has become a global problem at the national and international levels. Due to the increasing number of cases of violence against women and children, the government is required to improve services for victims of violence against women and children. To improve these services, the central government through the ministry of women's and children's protection issued the Minister of Women's and Children's Empowerment Regulation Number 4 of 2018 concerning the establishment of UPTD for the Protection of Women and Children in the regions. Gaps, including: lack of budget, coordination between stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so that performance still requires improvement in facing challenges for future improvements. By using descriptive qualitative research, the researcher describes Accountability in handling victims of violence for women and children. In addition, it also describes some of the main obstacles faced by this institution, including budget problems, facilities, personnel, victim disclosure, and community support.

**Keywords**---*accountability, violence, woman and children.*

## Introduction

Accountability is a requirement for the creation of good governance, democratic and trustworthy (good governance). Government institutions with public accountability mean that these institutions are always willing to take responsibility for all activities mandated by the people. Likewise, the community in exercising control has a great sense of responsibility for the common good. The community's responsibility to exercise control over government institutions is a form of community participation. This is very important to get our collective attention, because accountability itself is not only needed for the government but also for the community. Accountability for the community should be accompanied by the existence of equal facilities or access for the entire community to exercise control over the government.

The implementation of public services carried out by government officials in various service sectors, especially those concerning the fulfillment of civil rights and basic needs, is still felt to be not in accordance with the demands and expectations of the community. This is evidenced by the number of complaints or complaints from the public, regarding the procedures and service work mechanisms that are convoluted, non-transparent, less informative, less accommodating, less consistent, limited facilities, facilities and service infrastructure so that it does not guarantee certainty (law, time of day). and costs) and there are still many illegal levies and actions indicated by irregularities, collusion, corruption and nepotism (KKN), so that it can create an unfavorable image of the government.

One of the efforts to realize accountable services to service users, among others, has been the Decree of the Minister of PAN No. 26/KEP/M.PAN/6/2004 concerning technical guidelines for Transparency and Accountability in the Implementation of Public Services. The purpose of the stipulation of these technical guidelines is as a reference for all public service providers to improve the quality of public service accountability, while the purpose of the stipulation of technical guidelines is to provide clarity for all public service providers in carrying out public services so that they are of quality in accordance with the demands and expectations of the community. However, realizing the demand for increased accountability is not an easy matter for the regions.

Currently, one of the services needed by the community is the protection service for women and children who are victims of violence. The rise of cases of violence against women and children lately is a social and humanitarian problem that needs special attention. Everywhere now fall victims of acts of violence which generally come from among women and children so that special services are needed from the government for victims of these acts of violence. Violence against women and children is an act or act that can injure people both physically and psychologically, therefore violence against women and children is a violation of human rights that is not justified not only by legal norms, but also religious norms and cannot be justified in civilization. (social culture) humans.

Women and children are very vulnerable to various forms of violence, both in urban and rural areas. Violence against women and children, both sexual and non-sexual violence is more experienced by women and children in urban areas than in rural areas. Although the number of cases of violence against women and children cannot be ascertained with certainty, the data revealed are very worrying. This phenomenon is like an iceberg because this violence will only be known if the victim is willing to report the case of violence he experienced to government officials, either the nearest RT or RW level apparatus or to other official institutions. The increasing number of cases of violence against women and children is a global problem at the national and international level that needs serious attention and action by all parties. The government issued Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The instructions of the Minister of PPPA ask regional heads to actively take efforts to protect women and children.

The Riau provincial government initially formed a technical implementing unit called the integrated service center for the protection of women and children through Governor's regulation number 56 of 2017 concerning the establishment of a Technical Implementation Unit within the Office of Women's Empowerment and Child Protection. However, in 2018 the central government through the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia issued ministerial regulation number 4 of 2018 concerning guidelines for the formation of UPT for the protection of women and children in the regions. This policy was followed by the Riau provincial government with the issuance of the Riau Governor's regulation Number 85 of 2019 concerning the establishment of a Technical Implementation Unit within the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning in Riau province. Since its establishment in 2018, the UPT for the Protection of Women and Children has handled 443 cases of violence against women and children. In addition to receiving reports directly, the UPT for the Protection of Women and Children also received case referrals from regencies/cities throughout the province of Riau

Table 1.1 : Data on Violence against Women and Children in Riau Province

No.	Cases	Years			Total
		2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Domestic violence	49	43	31	123
2	Sexual Crime	74	59	39	172
3	Child Custody	27	32	19	78
4	Children in conflict with Law	3	2	0	5



5	Persecution	2	6	5	13
6	Missing children	2	6	1	9
7	Trafficking	1	1	0	2
8	Psychic Violence	6	0	0	6
9	Child Education Case	5	0	4	9
10	Physic Violence	3	0	0	3
11	Pure Criminal	5	2	0	7
12	Juvenile delinquency	5	6	3	14
13	Women's Discrimination	0	1	0	1
14	Bullying	0	1	1	0
15	Children's Rights	0	1	0	1
Jumlah		182	160	103	443

Source: Women's Empowerment Office Child Protection Agency Of Riau Province

From the table above, the total number of complaints to the UPT Office for the Protection of Women and Children in Riau Province has indeed shown a decline since the UPT PPA office was established, but this is not due to the decrease in acts of violence against women and children in Riau province, but because several districts / cities have formed UPT. Protection of Women and Children. This is in accordance with the Minister of Women's Empowerment Regulation number 4 of 2018 concerning the establishment of the UPTD for the Protection of Women and Children in the regions.

The handling of complaints from victims of violence received by the UPT for the Protection of Women and Children in Riau Province is received directly or by referrals from the district / city governments throughout the Riau province or other institutions in the region. Direct complaints can be made by telephone or come directly to the UPT Office for the Protection of Women and Children. The complaint process itself can be done by utilizing information technology in line with the current rapid development of technology.

The rate of violence is an iceberg phenomenon, because many women and children who are victims of violence do not dare (shame) and even think it is taboo to tell their experiences of violence and are sometimes slow to come to service institutions to ask for help. This reluctance and inability are mostly due to the growing stigma in society that women who are victims of violence are considered guilty, or do not have good morals and therefore deserve acts of violence as experienced.

## Research methods

The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach, namely research that seeks to describe the object or subject under study in accordance with what it is, as well as explain the variables studied. In obtaining the necessary data and information, the authors use primary data, namely data obtained through observations and interviews, and secondary data, namely data obtained through data collection or processing of documentation studies such as references or regulations related to the accountability of the provincial government. Riau In Handling Violence for Women and Children.

According to Sugiyono, data collection techniques can be obtained through observation, interviews, documentation and triangulation (Imron, 2019). In this study, the data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Then the data will be processed using descriptive analysis in accordance with the objective conditions encountered in the field which examines the accountability of the Riau Provincial Government in Handling Violence for Women and Children.

## Results and Discussion

Accountability is used by the government to show the performance that has been done in order to obtain good recognition and assessment (Sadjiarto, 2000). Accountability according to Sheila Elwood has several types, namely legal accountability, process accountability, program accountability and policy accountability (Agitia, 2019).

### Riau Province Government Accountability in Handling Violence for Women and Children

#### Legal Accountability

In analyzing the accountability of the Riau Province government related to the handling of acts of violence for women and children, this study uses one of the concepts, namely legal accountability. Legal accountability means that there is a guarantee of compliance with laws and other regulations used in handling acts of violence against women and children. The establishment of the UPT for the Protection of Women and Children based on the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation number 4 of 2018 concerning the establishment of the UPTD for the Protection of Women and Children in the regions.

Based on the PPPA Ministerial Regulation number 4 of 2018, the tasks of the UPT for the Protection of Women and Children are six, including: 1. Community advisors, 2. Case management, 3. Victim outreach, 4. Victim assistance, 5. Mediation, 6. Safe houses. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection encourages local governments to immediately establish an UPTD for the Protection of Women and Children no later than 2020, but due to several factors, there are still several regencies and cities in Riau province that have not yet formed an UPTD for the Protection of Women and Children. This is proof that

the Riau provincial government and districts/cities throughout Riau Province comply with and are committed to the implementation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Regulation number 4 of 2018 concerning the establishment of UPTD for the Protection of Women and Children in the regions.

### **Service Accountability**

The definition of public service according to Kepmen PAN Number 25 of 2004 is all service activities carried out by public service providers as an effort to fulfill the needs of service recipients, as well as in the context of implementing the provisions of laws and regulations. Meanwhile, the PAN Ministerial Decree No. 58/2002 categorizes three services from agencies. The grouping of these types of services is based on the characteristics and nature of the activities and service products produced, namely (1) administrative services, (2) goods services, (3) services. Based on some of the definitions above, it can be concluded that public services are all forms of services in the form of public goods and services which are the responsibility of the central government, regional governments and BUMN and BUMD as service providers in the context of meeting community needs and in the context of implementing laws and regulations.

Public service standards according to the Decree of the Minister of PAN Number 63/KEP/M.PAN/7/2003 at least include: a. service procedures; b. Completion time; c. Service fee; d. Service products; e. Facilities and infrastructure; f. Competence of service officers Excellent service is the service provided to customers (community). Minimum in accordance with service standards (fast, precise, accurate, cheap, friendly). The things that are attached to excellent service are: a. Hospitality b. Credibility c. Access d. Appearance of facilities e. Ability to provide services. According to Dadang Solihin (2007) Accountability consists of:

1. There is a match between implementation and standard implementation procedures.
2. There are sanctions set for errors or omissions in the implementation of activities.
3. There are measurable outputs and outcomes.

To provide services to victims of violence, the officers at the UPT PPA office consist of structural officials including one echelon III official filled by the head of the UPT, one head of the Administrative Sub-section, one Head of Complaints, one person for follow-up. In providing daily services, services to the community who come to report are served by a complaint service officer consisting of 3 counselors, 1 comedian, 1 investigator. Meanwhile, officers at the front office consist of 2 non-civil servants. For follow-up reports by experts such as counseling by psychologists, legal assistance by lawyers and religious assistance, UPT PPA Riau Province does not yet have it. For these services, UPT PPA collaborates with universities in Pekanbaru, legal aid offices and socio-religious institutions. UPT PPA Riau Province makes a Cooperation Agreement with the expert agency which is carried out at the beginning of the fiscal year.



Problems often occur at the beginning of the fiscal year, including due to the slow process of disbursing the budget to pay the honorarium of experts, while many complaints come in at the beginning of the year. In addition, the problem of the availability of infrastructure is also an obstacle when there are victims who report that they need a temporary shelter while the UPT PPA Riau Province does not yet have a halfway house in accordance with the regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 4 of 2018. However, services for victims of violence are still carried out, with although with many limitations.

From the interviews conducted by the authors with the reporters, some of them said that there were still shortcomings in services, especially related to service facilities. The service room which is soundproof is only one room and is not equipped with air conditioning so that when there are several reporters, use a room that is not soundproof. In addition, the mediation room is still separate from the main office, the mediation room has been using the kitchen room which is also used as a temporary shelter. Reporters from regions also complained about the slow handling of victims for examination by psychologists, this happened because UPT PPA in the regions did not have psychologists, so if there was a request, they had to write to UPT PPA in Riau Province.

### **Conclusion**

In handling victims of cases of violence against women and children, UPT PPA Riau Province still facing some obstacles. The main obstacles are related to financial problems and inadequate facilities. According to research informants as assistants at UPT PPA Riau Province, one of the unavailable facilities is a safe house facility as a temporary shelter for victims of violence in physical recovery and psychological trauma. The Riau provincial government has not provided shelter facilities, so what has been done so far, if there are victims, they are only entrusted to an orphanage or similar place owned by the Riau Province social service. Another obstacle is related to the limited number of assistants, psychologists, and advocates with civil servant status. So far, UPT PPA Riau Province cooperates with universities and legal aid institutions to handle examinations by psychologists and lawyers.

The limited number of personnel makes handling cases of violence at UPT PPA Riau Province with a very wide area not optimal. Apart from being limited in quantity, the quality of human resources for trained assistants still needs to be improved so that a lot of training for field assistants is needed. This constraint is then quite influential on the limited access of the public, especially women and children, to the legal information they should receive. Facilities, as well as the quantity and quality of personnel have a bad impact on a successful implementation of the policy. The many cases of violence against women and children that have occurred so far require serious attention from the government. So far, for public complaints, UPT PPA Riau Province has utilized the role of UPT PPA in districts/cities for the complaint process. However, the limitations of human resources and infrastructure in districts/cities are more severe than the UPT PPA in Riau Province. It takes a strong commitment from the respective regional heads to be able to pay attention to the services of victims of this violence

because to build the quality of service requires sufficient human resources and adequate infrastructure.

## References

- Agitia, D. (2019). Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Program E-Ktp Di Tingkat Pemerintahan Daerah Pada Dinas Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 122–127.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupa Utara Kabupaten Bengkalis – Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111.
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau (2016). Tantangan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara.
- Djalal, H. (2015). Maritime Boundary Management and Border Area to Increase Sovereignty Indonesian. *Jurnal Pertahanan*, 1(1), 27–38.
- Gevisioner, Bangun, R., & Karyanti, K. (2013). Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara di Provinsi Riau. *Jurnal Bina Praja*, 05(01), 53–62.
- Hadrian, E. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183–203.
- Harahap, J. (2018). Border Area and National Security Issues. *Central European Journal of International and Security Studies*, 12(4), 214–223.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1).
- Imron. (2019). Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *Indonesian Journal on Software Engineering (IJSE)*, 5(1), 19–28.
- Irewati, A. (2014). Reviewing the Mechanism of Border Disputes Settlement in ASEAN. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 39–58.
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia and Malaysia in Increasing The Economy in Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 219–227.
- Izwan. (2015). Analisis Pelaksanaan Fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2013. *JOM FISIP*, 2(2), 1–14.
- Kase, D. A. (2020). Wilayah Perbatasan Negara dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Proyuris*, 2(1), 168–184.
- Mangku, D. G. S. (2016). Indonesian government authority in terms of border management with other countries. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 10(4), 55–58.
- Manik, J. D. N. (2018). Pengaturan Hukum Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Wilayah Negara. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 2015–2027.
- Mirza, & Aisyah, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Kepulauan Riau. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan ...*, 01(01), 14–34.
- Muchbid Albintani, M. and M. S. (2017). Strategic Border Region and Palika Potential Main in the Coastal Malaka Strait, Riau, Indonesia. *Global Journal of Politics an Law Research*, 5(7), 17–24.
- Muhammad, A. S. (2017). Collaborative Governance Model in Managing



- International Borders in Riau Islands Province using Partial Least Squares Method. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 21(2), 166.
- Nadalutti, E. (2015). The rise of trans-border regions in Southeast Asia: behind the dynamics of informal and formal integration processes in the 'Indonesia–Malaysia–Singapore' growth triangle. *Pacific Review*, 28(4), 607–630.
- Nasution, M. S. (2019). Potensi Wilayah Perbatasan Strategis. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 117.
- Priangani, A. (2014). Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Integrated Border Management ( IBM ) dalam Meningkatkan Daya Saing Investasi dan Perdagangan Indonesia. *Kontigensi*, 2(2), 108–125.
- Purwanto, H., & Dewa Gede Sudika, M. (2016). Legal instruments of the republic of indonesia in border management using the perspective of archipelagic state. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4), 51–59.
- Putri, R. Y. (2019). The Village Governance Model That Empowers Communities in Indonesia's Border Areas. *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 16.
- Rani, F. (2012). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan. *Jurnal Transnasional*, 4(1), 1–17.
- Razma, O., & Sucipta, P. R. (2018). Politik Hukum Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Selat*, 6(1), 37–60.
- Rusdiyanta. (2017). Collaborative Border Management as the Strategic Revitalization of State Border Management in Indonesia. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 116(Special Issue), 415–426.
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.
- Siburian, H. Y., Rifardi, & Tanjung, A. (2020). Pengaruh Perubahan Garis Pantai Terhadap Implementasi Hukum Laut di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Perikana Dan Kelautan*, 25(1), 53–63.
- Tampomuri, H. R. (2020). Digitalization and Human Security: State Border Management Strategies in the Era of Industrial Revolution 4.0. *The 3rd International Conference on Technology, Education and Social Science 2020 (The 3rd ICTESS 2020)*, 2020, 315–328.
- Ulfa, N., Fimmastuti, D. R., & Nia Rahmah, A. N. (2018). Hard and Soft Border Paradigm for Border Governance in Indonesia: A General Review. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 3(1), 71.
- Wibowo, E. B. (2021). Collaborative Governance in border management policies to support national defense (a case study on the land border of West Kalimantan Province) 093-2103. *Turkish Journal of Computer and Mathematics ...*, 12(13), 2104–2113.
- Windradi, F., & Wahyuni, N. (2020). Konsep Pengaturan Dan Ratifikasi Batas Kedaulatan Wilayah Laut Negara Kesatuan Ri Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, 3(1), 23–41.